

Hasil Penelitian

PENUMBUH-KEMBANGAN INOVASI MELALUI LABORATORIUM INOVASI BAGI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

(GROWTH OF INNOVATION DEVELOPMENT THROUGH THE INNOVATION LABORATORY FOR LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA)

Desak Widhiastuti Srimarchea, Tri Noor Aziza

Puslitbangji Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara
Alamat: Jl. H. M. Ardans Ringroad III Samarinda
Kalimantan Timur - Indonesia
Email: desakwidhiastuti@gmail.com

Diterima: 10 Juni 2021; Direvisi: 03 September 2021; Disetujui: 17 September 2021

ABSTRAK

Sejak reformasi tahun 1998 terjadi perubahan dalam berdemokrasi, dari sentralistik menjadi desentralistik serta adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri disertai tanggung jawab untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu terobosan dalam peningkatan layanan adalah melalui inovasi. Lembaga Administrasi Negara mencoba menumbuh-kembangkan inovasi di pemerintah daerah melalui Laboratorium Inovasi dengan menggunakan instrumen 5D (Drum up, Diagnose, Design, Deliver dan Display). Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan kemanfaatan laboratorium inovasi dalam penumbuh-kembangan inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan literatur sekunder yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa Pelaksanaan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin berjalan sesuai dengan tahapan 4D dengan menghasilkan ide inovasi yang telah diuji coba sebanyak 58 inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan 218 inovasi. Adapun manfaat pendampingan laboratorium inovasi diharapkan menjadi cikal bakal dan bekal bagi daerah agar dapat secara mandiri melaksanakan penumbuh-kembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kata kunci: inovasi, pemerintah daerah, laboratorium inovasi

ABSTRACT

Since the 1998 reform, there has been a change in democracy, from centralized to decentralized, and regional autonomy, which gives freedom to each region to manage its area with the responsibility to provide and improve services to the community. One of the breakthroughs in service improvement is innovation. The State Administration Institute fosters innovation in local governments through the Innovation Laboratory using 5D instruments (Drum up, Diagnose, Design, Deliver and Display). This paper aims to describe the implementation and benefits of the innovation laboratory in the development of innovation in Tanah Bumbu Regency and East Kotawaringin Regency. Data was collected through a secondary literature study which was analyzed with a qualitative descriptive approach. From the analysis results, it is known that the implementation of the innovation laboratory in Tanah Bumbu Regency and Kotawaringin Regency is running according to the 4D stage by generating innovative ideas that have been tested as many as 58 innovations in Tanah Bumbu Regency and 218 innovations. The benefits of assisting the innovation laboratory are expected to be the forerunner and provision for regions to carry out innovation developments that can increase regional competitiveness independently.

Keywords: innovation, local government, innovation laboratory

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu kebijakan yang lahir untuk menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi serta semangat pembaharuan tentang demokratisasi antara hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan upaya pemberdayaan suatu daerah. Adanya otonomi daerah, setiap daerah akan lebih mudah untuk mengelola daerahnya masing-masing dalam mengembangkan pembangunan daerah. Seiring dengan terbitnya regulasi tersebut maka yang menjadi salah satu tugas terpenting pada setiap organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap instansi pemerintah dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat karena posisi mereka yang berada di garda depan dan terjun langsung dalam pemberian pelayanan. Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur agar setiap organisasi/instansi pemerintah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik menjadi cerminan utama bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah. Berjalannya suatu pemerintahan dengan baik dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dari pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/warga negara (Deby, Putri and Mutiarin, 2018).

Sebagaimana disampaikan Nuriyanto (2014), konsep pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik cukup baik. Hanya saja dalam implementasinya masih tidak ideal, karena konsep yang cukup baik tidak didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan pantas. Menurut Maulana & Yulianti (2018) buruknya pelayanan di Indonesia sebagian besar diakibatkan ketidakjelasan standar pelayanan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mengakibatkan mal administrasi, berupa ketidakpastian hukum, ketidakakuratan pelayanan dan praktik-praktik pungli pada penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai ke daerah.

Menurut Mahsyar (2011) kelemahan pelayanan publik terletak pada dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan penyelenggaraan. Dari aspek kelembagaan, desain organisasi tidak dirancang khusus untuk memberikan pelayanan, penuh khirarki sehingga pelayanan berbelit-belit

(birokratis), dan tidak terkoordinasi. Dari aspek penyelenggaraan, dinilai kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessible*, kurang koordinasi, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan inefisiensi.

Birokrasi yang rumit membuat masalah yang mudah diselesaikan menjadi sulit yang membuat masyarakat mengeluh akan kinerja pemerintah. Buruknya kinerja pelayanan publik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah sehingga perlu dievaluasi kembali dalam menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan tidak berbelit-belit (Mahsyar, 2011). Membangun hubungan yang baik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting, karenanya peningkatan kinerja pelayanan publik menjadi hal utama yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang melayani (Ningtyas and Ian, 2013).

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terkadang masih menjadi sorotan bagi khalayak ramai. Selain persoalan penundaan pelayanan publik dan pungli, penyalahgunaan wewenang juga menjadi masalah pelayanan publik di daerah (Andrian, 2016). Penyalahgunaan kewenangan membuat masyarakat merogoh uang untuk mempercepat proses administrasi dalam layanan publik antara lain saat mengurus layanan KTP. Birokrasi yang rumit membuat masalah yang mudah diselesaikan menjadi sulit yang membuat masyarakat mengeluh akan kinerja pemerintah. Buruknya kinerja pelayanan publik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah sehingga perlu dievaluasi kembali dalam menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan tidak berbelit-belit (Andrian, 2016).

Sejak pintu reformasi di segala bidang dibuka secara lebih luas, maka pemerintah daerah tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang pasif, melainkan diletakkan pada tatanan yang responsif aktif, sehingga kebijakan-kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan dengan mudah dikontrol oleh masyarakat. Untuk mendukung proses kinerja tersebut, maka diperlukan sebuah terobosan yang akan membantu cara kerja organisasi/instansi pemerintah, salah satunya dengan inovasi. Inovasi merupakan sebuah sarana atau pembaharuan dalam mengimplementasikan ide, gagasan, pokok pikiran yang dicetuskan untuk memberikan nilai

tambah atau menghasilkan suatu produk yang tentunya dalam hal ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Perubahan adalah hal yang mutlak terjadi dalam kehidupan. Perubahan tersebut menuntut tindakan penyesuaian untuk menghadapinya. Jika penyesuaian tidak dilakukan, maka dapat berpengaruh pada kualitas keberlangsungan hidup sebuah masyarakat. Kondisi tersebut juga berlaku bagi organisasi, baik organisasi publik maupun swasta (Deby, Putri and Mutiarin, 2018).

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2014, menguatkan komitmen pemerintah untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan inovasi daerah. Melalui regulasi ini diharapkan setiap daerah dapat menciptakan inovasi sebanyak-banyaknya karena dengan inovasi akan membantu kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah. PermenPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik mendorong setiap organisasi/instansi pemerintah untuk membuat gerakan aksi *one agency one innovation*. Inovasi terbaik dapat diikuti dalam kompetisi prestisius Top 99 Inovasi dalam Sistem Informasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan kementerian PAN dan RB.

Data *Global Innovation Index* tahun 2019 memosisikan Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara pada tahun 2018, naik 2 tingkat dari tahun 2017 yang berada di posisi 87 (Dutta, Soumitra, 2019). Hal ini membuktikan bahwa melalui inovasi akan berdampak positif bagi kinerja organisasi/instansi pemerintah. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam menerima layanan dari pemerintah. Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label "negatif" yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik (Deby, Putri and Mutiarin, 2018).

Lembaga Administrasi Negara mengambil peran pada upaya mengakselerasi pertumbuhan-kembangan inovasi tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah melalui pendampingan inovasi pemerintah daerah dengan Program Nasional Laboratorium Inovasi. Lembaga Administrasi Negara, 2018:1) dalam Manual Praktisnya menyebutkan bahwa akselerasi inovasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengakselerasi penerapan program reformasi birokrasi, khususnya dalam

tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing daerah. Dalam pelaksanaan Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara menggunakan instrumen 5D (*Drum up, Diagnose, Design, Deliver dan Display*).

Penetapan 11 lokus Laboratorium Inovasi adalah sesuai arahan Kementerian Perencanaan Nasional. Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotawaringin di Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah menjadi kabupaten/kota prioritas nasional yang menjadi lokus Laboratorium Inovasi 2018. Beberapa penelitian mengenai upaya penumbuh-kembangan inovasi diantaranya pernah dilakukan oleh Rahayuningsih (2013), menurutnya menumbuh-kembangkan inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan mengembangkan kreativitas di organisasi.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu curah pendapat di dalam tim/kelompok kerja, gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas meliputi pengampilan keputusan partisipatif, kepemimpinan transformasional, *high exchange* dan mengembangkan kultur kreatif. Hal sejalan juga disampaikan oleh Everett M. Rogers dalam Djamrut (2015) Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu; adanya kebebasan untuk berekspresi; adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif; tersedianya sarana dan prasarana; dan kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

Walaupun banyak penelitian yang membahas mengenai cara-cara menumbuh-kembangkan inovasi, namun belum ada kajian yang membahas mengenai upaya penumbuh-kembangan inovasi melalui pendampingan inovasi ke pemerintah daerah dalam bentuk laboratorium inovasi. Karenanya penulis merasa perlu untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendampingan inovasi melalui laboratorium inovasi. Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendampingan inovasi melalui laboratorium inovasi yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara serta ingin melihat kemanfaatan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin guna mempercepat pelayanan publik.

METODE

Kajian ini merupakan studi kasus dari pelaksanaan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin pada tahun 2018. Kajian ini merupakan kajian

deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder meliputi dokumentasi hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dokumen laporan, dan berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan yang dipilih dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu dari 13 kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu yang berdiri sejak tahun 2003 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru memiliki luas wilayah sekitar 4.890,30 km² dan dihuni oleh 322,65 ribu jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan (BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2021:69). Dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan daerah, kabupaten ini memiliki 30 Dinas/sekretariat/lembaga teknis daerah, 10 Kecamatan dan 5 Kelurahan dengan jumlah ASN

sekitar 4.146 orang, di luar Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tahun 2018 (BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2019:45). Sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 16.796 km² yang terbagi atas 17 kecamatan, 168 desa dan 17 kelurahan. Menurut data administrasi penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada semester 2 tahun 2019 terdapat sebanyak 414.463 penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 sebesar 0,63 persen (BPS Kabupaten Kotawaringin, 2021:91). Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2018 terhadap kedua daerah tersebut diketahui bahwa berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 4672 Tahun 2020, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh skor 30 dan Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh skor 46 seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel.1 Peringkat Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Ranking	Kabupaten	Lingkungan	Ekonomi	Sosial	Tata Kelola	IDSDB
212	Tanah Bumbu	52.595	43.419	51.272	62.500	52.011
315	Kotawaringin Timur	51.075	40.923	59.545	37.500	46.480

Sumber: Data Penelitian (2020)

Laboratorium Inovasi. Inovasi menurut Makmur dan Tahier dalam Wahyuni & Aziza (2018) manfaat pada manusia. Pendapat lain disampaikan David Albury dalam Djamrut (2015) yang mendefinisikan inovasi sebagai ide-ide baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya dan memiliki nilai manfaat. Adapun Utomo (2016:5) menyatakan bahwa inovasi itu cukup dilakukan dengan rumus ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Berdasarkan uraian tersebut sesungguhnya inovasi itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Inovasi itu mudah untuk dilakukan apabila ada kemauan untuk melakukan perubahan.

Bukan itu saja, inovasi bisa berjalan jika pemerintah setempat mendukung penuh proses inovasi tersebut. Menurut Everett M. Rogers dalam Djamrut (2015) Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu; adanya kebebasan untuk berekspresi; adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif;

tersedianya sarana dan prasarana; dan kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

Hadirnya Laboratorium inovasi diharapkan sebagai sebuah ajang bagi organisasi/instansi pemerintah untuk menemukan ide-ide baru yang dapat ditumbuhkembangkan menjadi sebuah inovasi yang dapat direplikasi oleh unit kerja yang lain. Adanya program ini nantinya dapat menstimulus pola pikir pegawai memunculkan kreatifitas untuk mendukung jalannya organisasi dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Inovasi sebenarnya bukan hal yang baru pertama kali didengar di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin. Praktek inovasi sudah berjalan di beberapa instansi pemerintah di Tanah Bumbu dan Kotawaringin yang mampu mendukung jalannya unit kerja tersebut. Hanya saja selama ini berjalan sendiri-sendiri bagi siapa yang ingin melaksanakan dan belum terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik. Laboratorium Inovasi adalah mekanisme *inside-out* yang dilakukan sendiri oleh instansi yang

hendak berinovasi (logika telur pecah). Pendampingan dari luar (*outside-in*) hanya bersifat stimulatif (logika “pengeraman” atau inkubasi) (Utomo, 2016). Selama proses penyelenggaraan, Laboratorium Inovasi menerapkan tahapan 5D.

Tahapan pertama *Drum-up*, motivator yaitu memberikan materi pengenalan laboratorium inovasi, ibaratnya menabuh genderang agar *audiens* memiliki semangat menumbuhkan inovasi. Tahap kedua *Diagnose*, dilakukan pendampingan untuk memicu munculnya ide kreatif. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Tanah Bumbu berhasil memunculkan 239 ide inovasi. Kabupaten Kotawaringin terdapat 370 ide inovasi.

Tahapan ketiga *Design*, perangkat daerah diminta untuk mendesain ide inovasinya kemudian dikonsultasikan dan diverifikasi untuk memastikan bahwa inisiatif yang ditawarkan dapat diimplementasikan serta memiliki unsur kebaruan dan kemanfaatan. Hasilnya, ada 196 ide inovasi dari 52 perangkat daerah yang dapat diimplementasikan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Kotawaringin dari 370 judul inovasi yang dikonsultasikan di awal, hanya 218 proposal inovasi yang diterima. Pada tahap ini seluruh inovasi yang diterima berdasarkan pada kriteria inovasi dan telah mendapatkan masukan/saran oleh Tim PKP2A III LAN yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat ataupun dapat dilaksanakan di tahun mendatang karena diperlukan perencanaan yang lebih matang kembali.

Tahapan keempat *Delivery*, atau uji coba implementasi ide inovasi. Berdasarkan data yang diperoleh Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 58 ide inovasi yang telah berhasil diimplementasikan pada tahun berjalan (Aziza, et al., 2018). Kabupaten Kotawaringin menghasilkan 218 inovasi dari 55 OPD/ Bagian yang siap untuk di-*launching* (Kusumaningrum, et al., 2018). Sedangkan tahapan kelima yaitu *Display*, belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan menunggu moment yang bertepatan dengan *event* besar pada kedua kabupaten tersebut.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa antusias kedua daerah dalam memunculkan ide kreatif sangat besar. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah ide inovasi yang muncul pada tahapan *Diagnose*. Pada tahapan *Design*, jumlah inovasi berkurang setelah dilakukan screening/pemilahan terhadap proposal inovasi berdasarkan kriteria kesiapan inovasi untuk uji coba. Menariknya, pada tahapan *Delivery* atau pelaksanaan uji coba, jumlah inovasi yang diuji coba di Kabupaten Tanah Bumbu hanya sekitar 30% sementara di Kabupaten Kotawaringin semuanya dapat diuji coba.

Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa 70% dari ide inovasi tidak dapat diuji coba. Padahal ini merupakan kesempatan besar bagi daerah untuk dapat mengembangkan ide-ide kreatif untuk kemajuan daerah. Laboratorium Inovasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang dibiayai oleh APBN. Daerah terpilih mendapatkan keuntungan didampingi oleh Tim Labonasi LAN mulai dari awal sampai *launching* inovasi tanpa harus mengeluarkan anggaran untuk menghadirkan Laboratorium Inovasi. Hal ini tampaknya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Kabupaten Kotawaringin, sementara Kabupaten Tanah Bumbu tampaknya masih terkendala dengan daya dukung dan birokrasi di internal.

Kemanfaatan Penumbuh-kembangan Inovasi bagi Daerah. Menumbuh-kembangkan inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan mengembangkan kreativitas di organisasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu curah pendapat di dalam tim/keompok kerja pada perangkat daerah, gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas meliputi pengambilan keputusan partisipatif, kepemimpinan transformasional, *high exchange* dan mengembangkan kultur kreatif (Rahayuningsih, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 2. Jumlah Inovasi pada Tahapan Laboratorium Inovasi

Kabupaten	Tahapan				
	<i>Drum-up</i>	<i>Diagnose</i>	<i>Design</i>	<i>Delivery</i>	<i>Display</i>
Tanah Bumbu	-	239	196	58	Akan dilaksanakan pada event besar kabupaten
Kotawaringin	-	370	218	218	Akan dilaksanakan pada event besar kabupaten

Sumber: Data Penelitian (2020)

Adapun manfaat dari penumbuh-kembangan inovasi yang dirasakan bagi daerah sebagai berikut. *Pertama*, melalui Laboratorium inovasi diharapkan akan melahirkan inovator baru sebagai pencetus perubahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi organisasi dan publik. Inovasi-inovasi yang muncul dapat mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Melalui sinergitas kekuatan dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk fokus menghasilkan temuan dan inovasi yang aplikatif diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah di tengah persaingan global.

Hadirnya laboratorium inovasi, pemerintah daerah dapat terbantu untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dulunya dirasa sulit, sekarang menjadi mudah; adanya perubahan *mindset* dan *culture set* memacu penyelenggara pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin dalam menumbuhkan ide dan gagasan inovatif yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perangkat daerah. Hal ini senada dengan pendapat Utomo (2016) bahwa inovasi dapat menjadi pencetus perubahan paradigma dari yang dilayani menjadi melayani, dari inefisien menjadi efisien, dari *inward looking* yang berorientasi *self-interest* menjadi *outward looking* yang berorientasi *public values*.

Kedua, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari kinerja pelayanan publik yang semakin hari semakin membaik seiring dengan munculnya inovasi-inovasi yang memudahkan pelayanan publik maupun masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Wahyudi (2018), menurutnya inovasi menjadi suatu cara untuk menciptakan nilai tambah dalam pelayanan publik. Salah satunya, inovasi proses yang menurutnya dapat memberikan nilai efisiensi dan kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan. Inovasi dengan memangkas waktu pelayanan dan meminimalkan terjadinya *opportunity lost* menjadikannya nilai tambah bagi pengguna layanan. Lebih dari itu, praktek inovasi di beberapa daerah tersebut menunjukkan terjadinya adopsi pendekatan *network community governance* dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Tantangan Penumbuh-kembangan Inovasi di Daerah. Pada prakteknya, Laboratorium Inovasi memiliki tantangan baik internal maupun eksternal. Hasil pendampingan laboratorium Inovasi Kabupaten Tanah Bumbu

terdapat sekitar 70% ide inovasi yang tidak dapat dilakukan ujicoba. Adapun di Kabupaten Kotawaringin Timur semua ide inovasi yang lolos tahapan design 100 dapat diuji coba (Aziza et al, 2018; Kusumaningrum, et al., 2018). Setidaknya ada dua hal Kabupaten Tanah Bumbu.

Pertama, kesiapan pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam menstimulus pimpinan perangkat daerah untuk berkomitmen menumbuh-kembangkan inovasi. Harapannya, setiap pimpinan perangkat daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuh dan berkembangnya inovasi. Namun tidak semua pimpinan perangkat daerah dapat berperan dengan optimal. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu, pelaksanaan laboratorium inovasi kurang mendapat dukungan dari atasan atau pimpinan, padahal peran dan pengaruh pimpinan memiliki efek yang luar biasa dalam menggerakkan mesin organisasi yang macet.

Faktor penting tumbuhnya inovasi adalah pemimpin dan kepemimpinan, baik kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah maupun pimpinan tim inovasi daerah. Tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan (Fontana, 2011 dalam Rahayuningsih, 2013). Hal ini senada dengan yang disampaikan (Ramli, 2017) bahwa dalam pelaksanaan inovasi dibutuhkan pemimpin yang mempunyai intensitas komunikasi yang baik, antara sesama pimpinan, staf dan masyarakat secara luas. Lebih rinci lagi (Rosaliana, Wahyudi and Lutfi, 2018) menyimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki peranan yang kuat untuk mendorong tumbuhnya inovasi di suatu organisasi.

Pemimpin tidak dapat berpangku tangan sehingga sentuhan pemimpin sebagai pemilik visi misi masih diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan mengarah kepada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Karenanya, menurut penulis, arahan dan motivasi pimpinan daerah dan tindak lanjut pimpinan perangkat daerah penting untuk membangun budaya inovasi organisasi dan menggerakkan personil di bawahnya untuk melakukan berbagai terobosan berinovasi.

Rivai dan Mulyadi (2011) menyatakan kepemimpinan secara luas adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama

dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Bass (1990) menyatakan sejumlah definisi melihat kepemimpinan sebagai focus proses kelompok. Dari perspektif ini, pemimpin ada di pusat perubahan dan aktivitas kelompok. Dengan demikian kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok (Salutondok & Soegoto, 2015).

Kedua, keterbatasan sumber-sumber daya terutama sumber daya manusia dan pendanaan. Penyebab inovasi tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan ide inovasi yang dibuat terlalu tinggi (tidak sesuai kemampuan) namun tidak didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM serta ketersediaan pendanaan yang memadai. Kompetensi sumber daya manusia menurut Mangkunegara dalam Kartika dan Siregar (2020) yaitu: memiliki kemampuan eksekutif lini, memiliki pengetahuan yang luas tentang visi, memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan, dan memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang sumber daya manusia. Inovasi sebenarnya bukan hanya milik pribadi inovator namun juga milik dan tanggung jawab organisasi, sehingga diperlukan dukungan dari segenap komponen organisasi.

Menurut Herawati (2018) terdapat pengaruh signifikan dan terdapat korelasi yang sangat kuat antara sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanan publik, karenanya pemerintah senantiasa mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan memperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia di pemerintahan. Pola pikir inovasi yang sangat tergantung pada anggaran juga menjadi salah satu kendala. Padahal inovasi tidak selalu berkorelasi dengan anggaran. Kreativitas menjadi salah satu faktor yang memungkinkan ditemukannya ide baru, pengembangan baru hingga cara baru diseminasi barang atau jasa yang dihasilkan. Kreativitas merupakan pengembangan ide-ide baru sedangkan inovasi adalah proses penerapan ide-ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Hal tersebut berarti adanya inovasi harus dimulai terlebih dahulu dari kreativitas (Fontana, 2011 dalam Rahayuningsih, 2013).

Ide kreatif sebenarnya adalah sederhana, mudah, murah dan bermanfaat. Menyederhanakan yang rumit, memudahkan yang sulit, dan dapat menekan biaya menjadi murah bahkan tanpa biaya untuk sebesar-besarnya kemanfaatan. inovasi harusnya digali dari hal-hal sederhana (namun berdampak besar) dengan anggaran minim atau bahkan nol. Semangat kolaboratif saat ini menjadi lebih

penting dibandingkan dengan anggaran. Kolaborasi bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya pimpinan level puncak. Dengan kolaborasi, masalah yang sulit menjadi mudah untuk diselesaikan. Sebagaimana inovasi yang dilakukan oleh Kota Bandung menggunakan Model kolaborasi Pentahelix, dimana dalam model tersebut terdapat peranan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media (Kunariyanti, 2019).

Upaya Penumbuh-kembangan Inovasi di Daerah. Upaya menumbuhkembangkan inovasi daerah tidak lain dalam rangka untuk memperbaiki layanan publik. Inovasi di sektor publik akan berhasil apabila masyarakat banyak memiliki kemampuan untuk menjangkaunya dan tidak berarti apa-apa jika apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas. Inovasi juga harus memperhatikan budaya dan identitas lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. Pemanfaatan identitas lokal, tidak hanya strategis dalam mendekati inovasi kepada penggunaannya, tetapi juga bagian dari apresiasi atas existing budaya yang ada (Suwarno dan Lan, 2008). Hal ini mengacu pada upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik guna percepatan untuk mewujudkan nawacita. Di sisi yang lain menumbuhkembangkan inovasi juga sebagai bagian dalam mendorong daya saing daerah secara global.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah antara lain: *Pertama*, sinergitas kebijakan penguatan inovasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah yang semakin kompetitif. Kebijakan penguatan inovasi sebagai dukungan dalam meningkatkan inovasi daerah dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, bersih dan cepat menuju penciptaan kondisi *innovation-driven development*.

Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakanyang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi (Ismiatun, 2015).

Kedua, membangun jejaring inovasi melalui pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta, masyarakat dan media. Melalui jejaring yang dibangun diharapkan tercipta kolaborasi dan kerjasama yang mampu

menumbuhkembangkan inovasi dan difusinya (Zulfikar dan Jumiati, 2020). Ketiga, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Mempersiapkan SDM unggul di daerah merupakan langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah agar mampu bersaing dan turut berkontribusi dalam mengembangkan inovasi daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan para innovator pemerintah daerah terkhusus Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin mampu memunculkan ide-ide inovasi yang memberikan kemanfaatan dan dampak yang lebih luas bagi organisasi dan publik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dengan menghasilkan ide inovasi yang telah diuji coba sebanyak 58 inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan 218 inovasi di Kabupaten Kotawaringin. Adapun manfaat pendampingan laboratorium inovasi tersebut diharapkan menjadi cikal bakal dan bekal bagi daerah agar dapat secara mandiri melaksanakan penumbuh-kembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Dengan berbagai inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat memperbaiki tatalaksana dan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah yang telah berkesempatan mendapatkan pendampingan laboratorium inovasi secara kontinu dapat meneruskan kegiatan ini untuk menumbuh-kembangkan inovasi-inovasi daerah secara mandiri.
2. Perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah agar inovasi yang telah dibuat tetap berkesinambungan.
3. Perlunya dukungan kebijakan inovasi sektor publik dalam pengembangan inovasi daerah guna mewujudkan pemerintah yang "good governance," meningkatkan kompetensi inovasi aparatur sipil negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.
4. Menyusun *roadmap* inovasi daerah yang diintegrasikan dalam RPJMD masing-masing Daerah dengan memperhatikan skema pentahapan dan penciptaan inovasi

sebagai penggerak dalam proses pembangunan daerah. *Kelima*, melaksanakan festival/lomba inovasi di setiap akhir tahun sehingga bisa melihat perkembangan pelaksanaan inovasi di setiap SKPD/unit kerja, sehingga ke depan bisa diikuti dalam lomba inovasi tingkat nasional/dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Aziza, Tri Noor, Andi Wahyudi, F. H. W. et al. 2018. *Tanah Bumbu Resources.pdf*. Edited by M. dan S. zakiyah Darto. Samarinda: PKP2A III LAN.

BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021. *Kabupaten Kotawaringin Dalam Angka 2021*. Kotawaringin Timur: BPS Kotawaringin Timur.

BPS Kabupaten Tanah Bumbu. 2018. *Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka*. Tanah Bumbu: BPS Kabupaten Tanah Bumbu.

BPS Kabupaten Tanah Bumbu. 2021. *Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2021*. Tanah Bumbu: BPS Kabupaten Tanah Bumbu.

Deby, L., Putri, M. and Mutiarin, D. 2018. 'Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia', in *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*. Medan, pp. 1-16.

Djamrut, D. E. 2015. 'Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda', in *eJournal Ilmu Pemerintahan*, pp. 1472 - 1486.

Dutta, Soumitra, B. L. dan S. W.-V. 2019. *Global Innovation Index 2019: summary*. Geneva, Switzerland.

Herawati, P. 2018. 'Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kantor Pemerintah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), pp. 958-961.

Herman N.Suparman, Ditha Mangiri, Sarah Nita Hasibuan, Eduardo Edwin Ramda, M. T. 2020. *Daya Saing Berkelanjutan*. Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Hidayah, K. et al. 2018. 'Aktualisasi Budaya Inovasi Pada Organisasi Sektor Publik', *Jurnal Borneo Administrator*, 14(3), pp. 249-266.

Ismiatun, I. 2015. 'Pengembangan Sistem Inovasi Dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Pendekatan System Dynamics', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), p. 42437.

Kartika, R. S. 2020. 'Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pengisian indeks inovasi daerah kabupaten Banggai

- provinsi Sulawesi Tengah', *Inovasi*, 17(2), pp. 245–255.
- Kunariyanti, D. (2019) 'Inovasi pemerintah daerah berbasis kolaborasi, bandung creative city.', *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), pp. 1–7.
- Kusumaningrum, Mayahayati, L. R. et al. 2018. *Kotawaringin Resources*. Edited by D. M. Darto and Siti Zakiyah. Samarinda: PKP2A III LAN.
- Lembaga Administrasi Negara. 2018. *Manual Praktis Laboratorium Inovasi*. Jakarta.
- M. Tahir, M. dan and Harakan, A. 2016. 'Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar', *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom*, (October), pp. 278–299.
- Mahsyar, A. 2011. 'Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik', *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), pp. 81–90. doi: 10.26618/ojip.v1i2.22.
- Maulana, D. and Yulianti, R. 2018a. 'Pentingnya inovasi pelayanan publik di indonesia', in *Konferensi Nasional Administrasi Publik: Strategi Administrasi Pembangunan dalam Merespons Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara, pp. 32–37.
- Ningtyas, T. and Ian, S. 2013. 'Model Hubungan Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) berdasarkan “ Disconfirmation of Expectation ” di BPN Surabaya .', *Jejaring Administrasi Publik*, V(1), pp. 266–274. A
- Nuriyanto, N. 2014. 'Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?', *Jurnal Konstitusi*, 11(3), pp. 428–453.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Rahayuningsih, I. 2013. 'Pengembangan kreatifitas dan inovasi di organisasi', *Psikologi*, 1(1), pp. 1–13.
- Ramli, M. 2017. 'Kepemimpinan Inovatif Dalam Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah', *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 5(2), pp. 168–184.
- Rosaliana, L., Wahyudi, A. and Lutfi, W. 2018. 'Peran Kepemimpinan dalam Menumbuhkan Inovasi Sektor Publik di Kabupaten Kulon Progo', *Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, III(Administrasi Pelayanan Publik), pp. 37–51.
- Salutondok, Y. and Soegoto, A. S. 2015. 'Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong', *jurnal Emba*, 3(3), pp. 849–862.
- SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 4672 Tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2020
- Suwarno, Y. and Lan, S. 2008 'Inovasi Di Sektor Publik', *Jurnal Administrasi Publik Unpar*, 5(2), pp. 1–19.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Utomo, T. W. W. 2016a. *Inovasi Harga Mati: Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*, *Jurnal Wacana Kerja*. Rajawali Press.
- Utomo, T. W. W. 2016b. *Laboratorium Inovasi Menuju Pelayanan Prima : Embrio Membangun Sistem Inovasi Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wahyudi, A. 2018. 'Jurnal Bina Praja Praktek di Unit Pelayanan Terpadu', (May 2016).
- Wahyuni, T. and Aziza, T. N. 2018. 'Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah', *Jurnal Borneo Administrator*, 13(3), pp. 239–260. doi: 10.24258/jba.v13i3.300.
- Zulfikar, W. and Jumiaty, I. E. 2020. 'Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah di Kabupaten Bekasi .', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2) hal 119-131.